



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan

kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.



25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3

- (1) Maksud Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah :
  - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
  - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah :
  - a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
  - b. menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

- c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

#### BAB IV

#### SISTEMATIKA RENJA

#### Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

##### Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Review terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, program dan Kegiatan.

Perlindungan Anak Dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

- c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

#### BAB IV

#### SISTEMATIKA RENJA

#### Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

##### Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Review terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, program dan Kegiatan.

#### Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

#### Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Uraian Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan Renja melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Tahun 2024.

## BAB VI

### PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, outcome dan output sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.

- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah termasuk didalamnya mengenai pengelolaan daerah.

Pendekatan dalam penyusunan APBD yang selama ini menggunakan Sistem Anggaran Tunai (SAT) yang lebih menekankan pada penggunaan sumber daya dan dana (Input). diubah menjadi anggaran pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (Output) dari perencanaan alokasi biaya (Input) yang ditetapkan.

Sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan ini. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon mengakomodasi dan mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional. Provinsi Jawa Barat dan hasil evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan serta mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat terutama yang disampaikan dalam MUSRENBANG bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait termasuk dengan unsur Legislatif (DPRD).

#### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sejumlah peraturan Perundangan. Peraturan Daerah dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD adalah :



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20 Seri D);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 Seri D tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 32 Seri D).

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
  1. Sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dan bagi masyarakat karena memuat kebijakan pelayanan Bidang Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  2. Menjadi acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.
- b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan seluruh kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024.
  2. Menjadi acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas

#### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistematika Rencana Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA ) adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2 Program dan Kegiatan Tahun ini

##### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan Rencana Kerja yang dituangkan kedalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Pada pelaksanaannya memang terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang mempengaruhi dalam pencapaian kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya, adapun target dan capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.1 terlampir.

## 1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

Pada pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah dilakukan dengan maksimal, namun terdapat hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tersebut sehingga ada beberapa program/kegiatan yang targetnya tidak tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, adapun program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	2022		Keterangan	Tindak Lanjut
		Target	Capaian		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan	100 Persen	97,32 Persen	Terdapat 4 sub kegiatan yang capaiannya dibawah 100% sehingga mempengaruhi outcome program	Memaksimalkan capaian kinerja pada sub kegiatan yang termasuk dalam catatan tidak tercapai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terselenggaranya layanan pelaksanaan administrasi umum kantor	7 dokumen			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6.075 eksemplar	6.072 Dokumen	Adanya kekeliruan dalam menghitung jumlah target pada renstra perubahan dan DPA	Perhitungan awal pada DPA untuk penyesuaian target pada renja
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17 Jenis	10 Jenis	Kelalaian dalam merubah target pada renja perubahan	Perhitungan jenis bahan material pada awal penyusunan renja dengan DPA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156 Orang	138 Orang	Pada kondisi real ternyata proyeksi target berada diatas realisasi kegiatan yang mana menyesuaikan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tidak bisa diprediksi pada rapat yang sifatnya diluar perencanaan	Penyesuaian target renja dengan capaian renja tahun sebelumnya sehingga target dapat tercapai

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diberikan pemeliharaan	268 unit			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	161 Unit	149 Unit	Terdapat 22 kendaraan yang tercatat pada aset yang merupakan kendaraan rusak berat	Penyesuaian jumlah kendaraan yang tersedia
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	11,9 Persen	6,28 Persen	Merupakan data sekunder yang harus dicapai melalui kerjasama lintas sektoral	Membuat perjanjian kerjasama lintas sektoral
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang mendapat perlindungan	1,33 Persen	1,32 Persen	Masih terdapat kasus kekerasan pada perempuan	Perbanyak sosialisasi pada tingkat masyarakat terkait kekerasan pada perempuan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian	0,82 Persen	2,06 Persen	Masih banyaknya kasus perceraian pada kabupaten cirebon	Memaksimalkan peran Petugas Motekar dalam ketahanan keluarga serta kerjasama lintas sektoral
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang diberikan pelayanan komprehensif	138 orang			
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	134 Orang	110 Orang	Kesalahan perhitungan jumlah peserta dalam renja perubahan	Penyesuaian jumlah peserta pada pelaksanaan kegiatan mendatang
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase anak yang mendapat perlindungan	2,16 Persen	2,15 Persen	Masih terdapat kekerasan pada anak	Perbanyak sosialisasi pada tingkat masyarakat terkait kekerasan pada anak
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan penguatan kualitas keluarga	1.425 Orang			
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan, Kabupaten/Kota	50 KK	4 KK	Terdapat perbedaan antara keluaran kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan	Perencanaan kegiatan yang lebih sesuai lagi antara output dengan pelaksanaan isi DPA
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	750 Orang	244 Orang	Keterlambatan merubah target pada renja perubahan	Penyesuain target dengan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada renja mendatang
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah layanan korban kekerasan	100 Persen	100 Persen		
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan	360 orang			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	230 Orang	Keterlambatan merubah target pada renja perubahan	Penyesuain target dengan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada renja mendatang

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota gugus tugas yang mendapatkan penguatan, anggota lintas sektoral yang bersinergi	138 orang			
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan, Kabupaten/Kota	96 Orang	55 Orang	Keterlambatan merubah target pada renja perubahan	Penyesuaian target dengan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada renja mendatang
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Peningkatan jumlah akseptor MKJP</b>	<b>25,20 Persen</b>	<b>22,65 Persen</b>	<b>Masih banyak akseptor yang memilih alat kontrasepsi jangka pendek</b>	<b>Penyuluhan yang intensif lagi pada calon akseptor MKJP</b>
	<b>Peningkatan CU/PUS</b>	<b>75 Persen</b>	<b>72,09 Persen</b>	<b>Masih banyak unmeet need yang belum terfasilitasi kontrasepsi</b>	<b>Memfasilitasi peserta unmeet need media kontrasepsi</b>
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Jumlah kader PPKDB dan Sub PPKDB yang mendapat pembinaan</b>	<b>3.300 Orang</b>			
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan, Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3177 Orang	2120 Orang	Tidak sesuai antara target renja dengan jumlah peserta yang dilaksanakan	Perubahan target pada renja menyesuaikan dengan isi DPA
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah peserta KB Baru</b>	<b>87.100 orang</b>			
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	400 Orang	374 Orang	Ada beberapa peserta yang tidak dapat berpartisipasi	Penyesuaian target pada renja awal atau perubahan

Jika dilihat dari tabel diatas, terdapat beberapa program/kegiatan yang tidak mencapai target, hal tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian pada perencanaan awal dengan jumlah anggaran yang tersedia dan tidak dirubahnya target pada renja perubahan tahun anggaran 2022. Selain hal tersebut juga kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan program/kegiatan membuat target yang dicapai tidak maksimal. Pemahaman pejabat pelaksana teknis kegiatan terhadap esensi dari capaian program/kegiatan yang kurang sehingga tidak maksimalnya capaian kinerja itu sendiri.

Adapun capaian target yang kecil menjadi indikator yang baik sebagai contohnya pada program peningkatan kualitas keluarga dengan indikator meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian dan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator persentase anak yang mendapat perlindungan sebagai bentuk suksesnya dalam menekan angka kekerasan dan perceraian.

## 2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

Pada pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah dilakukan dengan maksimal, sehingga target dari program/kegiatan tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, adapun program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	2022		Keterangan
		Target	Capaian	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan	100 Persen	97,32 Persen	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja skpd yang tersusun	7 Dokumen		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Tersusunnya dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Tersusunnya dokumen LPPD, LKIP, Perkin IKU dan SPIP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 orang	40 orang	Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja sebanyak 40 orang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	3 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen CALK
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen Laporan Prognosis
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah	1 Dokumen		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik, Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen Monitoring Barang Milik Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terselenggaranya layanan pelaksanaan administrasi umum kantor	7 dokumen		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Jenis	1 Jenis	Tersedianya paket komponen instalasi listrik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan, Kantor yang Disediakan	4 Jenis	4 Jenis	Tersedianya peralatan gedung kantor (Komputer, Printer, Scanner & AC)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan, yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Tersedianya cetak Foto Copy dan Spanduk
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Jenis	2 Jenis	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makanan dan minuman tamu
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Orang	3 Orang	Tersedianya petugas penatausahaan arsip dinas (Pegawai Non PNS)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan administrasi umum yang dilaksanakan	4 jenis		

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jasa	3 Jasa	Tersedianya belanja jasa telepon, air dan listrik selama satu tahun
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Jasa	1 Jasa	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (cleaning service)
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang diberikan pemeliharaan</b>	<b>268 unit</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	73 Unit	73 Unit	Tersedianya bahan bakar minyak untuk 73 kendaraan operasional dinas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	40 Unit	Tersedianya jasa sewa gedung kantor dan pemeliharaan gedung kantor
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan</b>	<b>25 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	
	<b>Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian</b>	<b>11,9 Persen</b>	<b>6,28 Persen</b>	
	<b>Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan</b>	<b>35,90 Persen</b>	<b>38 Persen</b>	
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender</b>	<b>133 Orang</b>		
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender, (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Orang	66 Orang	Terselenggaranya sosialisasi PUG dan PPRG pada SKPD dan 66 orang peserta kegiatan
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perempuan kategori umum serta perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan</b>	<b>160 Orang</b>		
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	160 Orang	160 Orang	Terselenggaranya KIE pemberdayaan perempuan pada 160 orang peserta
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase perempuan yang mendapat perlindungan</b>	<b>1,33 Persen</b>	<b>1,32 Persen</b>	
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Korban yang mendapatkan Pelayanan terpadu</b>	<b>90 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat, Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	75 Persen	100 Persen	Terlaksananya 102 pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak oleh P2T/P2A
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>tersedianya buku data terpilah gender dan anak</b>	<b>120 Buku</b>	<b>120 Buku</b>	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak, Kabupaten/Kota yang Tersedia	120 Buku	120 Buku	Terlaksananya dan tersusunnya buku data terpilah gender
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Jumlah layanan korban kekerasan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>tersediannya informasi data keluarga</b>	-	<b>100 persen</b>	



<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga</b>	-		
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	9.734 Keluarga	9.734 Keluarga	Terfasilitasinya keluarga yang data kependudukannya diupdate
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya pencatatan dan pengumpulan data kependudukan keluarga selama 1 tahun
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	18 Unit	18 Unit	Terfasilitasinya gedung Balai Penyuluh terkait updating data / rumah data
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Peningkatan jumlah akseptor MKJP</b>	<b>25,20 Persen</b>	<b>22,65 Persen</b>	
	<b>Peningkatan CU/PUS</b>	<b>75 Persen</b>	<b>72,09 Persen</b>	
	<b>Jumlah pendidik/Motivator sebaya</b>	<b>340 Orang</b>	<b>508 Orang</b>	
	<b>Jumlah kampung KB dasar yang mengalami kenaikan status</b>	<b>10 Kampung KB</b>	<b>10 Kampung KB</b>	
	<b>Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan</b>	<b>20 Tahun</b>	<b>20 Tahun</b>	
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Jumlah Kecamatan yang teradvokasi KIE</b>	<b>40 Kecamatan</b>		
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40 Kecamatan	40 Kecamatan	Terlaksananya advokasi program KKBPK pada 40 kecamatan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	57 Lembar	57 Lembar	Tersedianya dokumen KIE
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media, Luar Ruang	60 Lembar	60 Lembar	Tersedianya dokumen promosi KI program Bangga Kencana
Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	40 Balai Penyuluh	40 Balai Penyuluh	Tersedianya laporan hasil pengelolaan Balai Penyuluh / Rumah Dataku
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program, KKBPK	57 Keluarga	57 Keluarga	Terfasilitasinya 57 keluarga dalam program KKBPK
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah peserta KB Baru</b>	<b>87.100 orang</b>		
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Gerak	3 Gerak	Pelaksanaan distribusi alokon sebanyak 3 kali gerak dalam 1 tahun
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Presentase anggota bina keluarga yang ber-KB</b>	<b>57,24 Persen</b>	<b>60,24 Persen</b>	

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota BKB, BKR dan BKL	72.872 Anggota		
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Jenis	2 Jenis	Tersedianya BKB KIT dan KIT Siap Nikah

Pada tabel diatas merupakan pelaksanaan Program/Kegiatan yang targetnya sudah sesuai dengan perencanaan, hal tersebut dipengaruhi oleh dukungan sektoral, koordinasi antar bidang pelaksana dan dana yang mencukupi sehingga pada pelaksanaannya tidak menemukan masalah yang cukup berarti dan membuat target tersebut dicapai dengan baik atau 100%.

### 3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja

Pada pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat program/kegiatan yang tercapai melebihi dari apa yang sudah ditargetkan, adapun program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	2022		Keterangan
		Target	Capaian	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan	100 Persen	97,32 Persen	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	3 Dokumen		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan, Tunjangan ASN	83 Pegawai	98 Pegawai	Adanya penambahan 4 orang CPNS dan 11 kasubbag TU UPTD P5A
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan	25 Persen	100 Persen	
	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	35,90 Persen	38 Persen	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina	175 orang		
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan, Kabupaten/Kota	45 Orang	51 Orang	Jumlah peserta yang diikutsertakan melebihi dari target renja
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang mendapat perlindungan	1,33 Persen	1,32 Persen	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Pelayanan terpadu	90 Persen		

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat, Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	75 Persen	100 Persen	Jumlah penanganan 102 kasus kekerasan oleh P2T/P2A dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan jumlah pengaduan kasus
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian</b>	<b>0,82 Persen</b>	<b>2,06 Persen</b>	
<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perempuan yang diberikan pembinaan pemberdayaan perempuan</b>	<b>100 orang</b>		
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	120 Orang	Jumlah peserta pada rencana pelaksanaan berbeda dengan peserta yang ikut serta dalam kegiatan
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Presentase anak yang mendapat perlindungan</b>	<b>2,16 Persen</b>	<b>2,16 Persen</b>	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah orang yang mendapatkan layanan penguatan kualitas keluarga</b>	<b>1.425 Orang</b>		
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	157 Orang	Jumlah peserta pada rencana pelaksanaan berbeda dengan peserta yang ikut serta dalam kegiatan
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Jumlah layanan korban kekerasan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah layanan korban kekerasan yang diberikan</b>	<b>58 layanan</b>	<b>177 Pelayanan</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Pelayanan	177 Pelayanan	Jumlah pelayanan pengaduan yang dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang ada pada kondisi yang sesungguhnya
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah anggota gugus tugas yang mendapatkan penguatan, anggota lintas sektoral yang bersinergi</b>	<b>138 orang</b>		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan, Kabupaten/Kota	96 Orang	100 Orang	Jumlah peserta pada rencana pelaksanaan berbeda dengan peserta yang ikut serta dalam kegiatan
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Jumlah pendidik/Motivator sebaya</b>	<b>340 Orang</b>	<b>508 Orang</b>	
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Jumlah Kecamatan yang teradvokasi KIE</b>	<b>40 Kecamatan</b>		
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	210 Orang	2400 Orang	Jumlah peserta yang melonjak dikarenakan adanya stimulus kegiatan berdasarkan anggaran DAK BOKB

<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah peserta KB Baru</b>	<b>87.100 orang</b>		
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan, Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8.000 Orang	18.441 Orang	Jumlah peserta yang melonjak dikarenakan adanya stimulus kegiatan berdasarkan anggaran DAK BOKB
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	855 orang	880 Orang	Jumlah peserta yang melonjak dikarenakan adanya stimulus kegiatan berdasarkan anggaran DAK BOKB
Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Meningkatkan, Kesetaraan KB Pria	100 Orang	120 Orang	Jumlah peserta yang melonjak dikarenakan adanya stimulus kegiatan berdasarkan anggaran DAK BOKB
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Jumlah Kampung KB yang diberikan pembinaan</b>	<b>10 Kampung KB</b>		
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di, Kampung KB	10 Kampung KB	123 Kampung KB	Jumlah peserta yang melonjak dikarenakan adanya stimulus kegiatan berdasarkan anggaran DAK BOKB
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Presentase anggota bina keluarga yang ber-KB</b>	<b>57,24 Persen</b>	<b>60,24 Persen</b>	
<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Anggota BKB, BKR dan BKL</b>	<b>72.872 Anggota</b>		
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32 Kelompok	75 Kelompok	Jumlah peserta yang melonjak dikarenakan adanya stimulus kegiatan berdasarkan anggaran DAK BOKB
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	37.600 Orang	136.195 Orang	Jumlah peserta yang melonjak dikarenakan adanya stimulus kegiatan berdasarkan anggaran DAK BOKB
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Kelompok	71 kelompok	Jumlah peserta yang melonjak dikarenakan adanya stimulus kegiatan berdasarkan anggaran DAK BOKB

Tabel diatas menunjukkan capaian program/kegiatan yang capaian targetnya melebihi dari target yang sudah ditentukan, adapun penyebab dari hal tersebut diantara lain karena pelaksanaan program/kegiatan yang sudah sangat baik, sehingga dapat melebihi dari target awal.

#### **4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Secara keseluruhan capaian kinerja program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih kurang baik, dapat dilihat dari masih banyaknya program/kegiatan yang capaiannya masih dibawah target bahkan sama sekali tidak tercapai. Hal ini sangat berpengaruh terhadap Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mana mencerminkan rendahnya pemahaman dan kurang maksimalnya pelaksanaan program/kegiatan dengan yang berpedoman pada Renstra dalam pelaksanaannya dan rendahnya evaluasi dan rencana tindak lanjut pada pelaksanaan program/kegiatan.

#### **5. Rencana Tindak Lanjut**

Dengan melihat implikasi yang terjadi pada capaian kinerja tersebut, diperlukannya tindak lanjut dari hasil capaian kinerja yang sudah dilaksanakan. Rencana tindak lanjut ini bertujuan untuk memperbaiki hasil capaian pada pelaksanaan program/kegiatan sebelumnya dengan mengevaluasi, menganalisis dan merumuskan rancangan teknis yang sesuai dengan kondisi riil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun rencana tindak lanjut secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan ulang sasaran dari indikator program/kegiatan;
- b. Pendalaman pemahaman tentang perencanaan program/kegiatan pada pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- c. Jejaring lintas sektoral dalam penentuan target sasaran agar saling bersinergi;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan;
- e. Perumusan target kinerja pada masing-masing pejabat pelaksana teknis kegiatan yang lebih baik lagi.

## **II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan kurang memuaskan jika dilihat dari capaian kinerja program/kegiatan sampai

dengan tahun berjalan. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab II.1 bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik permasalahan internal maupun eksternal, adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan			100	100	100	100	91,85	92	93	94	
2	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja skpd yang tersusun			7	7	7	7	7	7	7	7	
3	Buku RENSTRA dan RENJA			3	3	2	2	3	3	3	3	
4	Tersusnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			4	4	4	4	4	4	4	4	
5	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Badan/ Dinas			1	40	40	40	1	1	1	1	
6	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun			3	3	3	3	3	3	3	3	
7	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan			80	80	80	80	78	80	80	80	
8	Tersusnya buku laporan keuangan akhir tahun			1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Tersusnya buku laporan keuangan Semesteran			1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah			1	1	1	1	0	1	1	1	
11	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah			1	1	1	1	0	1	1	1	

12	Jumlah dokumen terselenggaranya layanan pelaksanaan administrasi umum kantor			6	7	7	7	6	6	6	6
13	Jumlah alat-alat listrik yang tersedia			11	11	11	11	0	6	6	6
14	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			9	9	9	9	6	6	6	6
15	Tersedianya kebutuhan barang cetakan			2	2	2	2	2	2	2	2
16	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan			8	16000	16000	16000	5	16000	16000	16000
17	Tersedianya Aktivitas Adminitrasi Perkantoran			20	20	20	20	16	18	20	20
18	Tersedianya makanan dan minuman			2	2	2	2	2	2	2	2
19	Terlaksanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			156	156	160	160	95	150	160	160
20	Jumlah petugas penatausahaan arsip dinas			3	3	3	3	0	3	3	3
21	Jumlah jasa penunjang urusan administrasi umum yang dilaksanakan			4	4	4	4	3	4	4	4
22	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik			3	3	3	3	3	3	3	3
23	Jumlah barang milik daerah yang diberikan pemeliharaan			268	268	268	268	277	279	279	279
24	Tersedianya STNK, Bahan Bakar Minyak dan Service kendaraan dinas jabatan			70	70	70	70	78	78	78	78
25	Tersedianya STNK, Bahan Bakar Minyak dan Service kendaraan dinas operasional			161	161	161	161	159	161	161	161
26	Tersedianya gedung kantor UPT DPPKBP3A			40	40	40	40	40	40	40	40
27	Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan			25	25	25	25	47	25	25	25
28	Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian			11,7	11,9	12,1	12,3	11,46	11,5	12	12,1

29	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan			35,8	35,9	36,1	36,2	35,7	35,9	36,1	36,2	
30	Jumlah peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender			133	133	133	133	133	133	133	133	
31	Peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender			33	133	133	133	133	133	133	133	
32	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina			175	175	175	175	45	175	175	175	
33	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina			45	45	45	45	45	45	45	45	
34	Jumlah perempuan kategori umum serta perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan			160	160	160	160	170	160	160	160	
35	Jumlah perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan			160	300	300	300	170	300	300	300	
36	Persentase perempuan yang mendapat perlindungan			1,29	1,33	1,37	1,41	0,13	0,8	1	1,1	
37	Jumlah masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan			245	245	245	245	145	245	245	245	
38	jumlah tayang iklan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak			92	6	6	6	12	6	6	6	
39	Jumlah tayangan program tv masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak			6	6	6	6	6	6	6	6	
40	Jumlah masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan			245	245	245	245	145	245	245	245	
41	jumlah tayang iklan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak			92	6	92	92	12	6	92	92	



42	Jumlah tayangan program tv masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak			6	6	6	6	6	6	6	6
43	Jumlah Korban yang mendapatkan Pelayanan terpadu			70	75	80	80	90	75	80	80
44	Jumlah korban dan anggota gugus tugas yang terfasilitasi pelayanan terpadu			70	75	80	80	90	75	80	80
45	Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian			0,83	0,82	0,82	0,81	0,78	0,82	0,82	0,81
46	Jumlah perempuan yang diberikan pembinaan pemberdayaan perempuan			100	100	100	100	100	100	100	100
47	Jumlah Kelompok Perempuan yang dibina (Kumulatif)			100	100	100	100	100	100	100	100
48	Peserta mendapatkan Pelatihan Keterampilan Pelaku IR (Kumulatif)			100	100	100	100	100	100	100	100
49	Jumlah peserta yang diberikan pelayanan komprehensif			138	138	138	138	352	138	138	138
50	Jumlah peserta yang terbina			138	138	138	138	352	138	138	138
51	Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender			100	100	100	100	100	100	100	100
52	Tersedianya buku data terpilah gender dan anak			120	120	120	120	120	120	120	120
53	Buku Data Terpilah Statistik Gender dan Anak			120	120	120	120	120	120	120	120
54	Presentase anak yang mendapat perlindungan			1,94	2,1	2,28	2,4	0,03	2,1	2,28	2,4
55	Jumlah orang yang mendapatkan layanan penguatan kualitas keluarga			1425	1425	1425	1425	603	1425	1425	1425
56	Jumlah keluarga yang mendapatkan akses parenting keluarga			50	50	50	50	8	50	50	50
57	jumlah tayangan iklan layanan masyarakat tentang pola asuh anak			7	7	7	7	2	7	7	7

58	Jumlah anggota lembaga/instansi/ organisasi yang berpartisipasi dalam kabupaten Layak Anak			100	635	635	635	510	635	635	635
59	Jumlah anggota lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan pengembangan KIE			100	100	100	100	83	100	100	100
60	Jumlah layanan korban kekerasan			100	100	100	100	100	100	100	100
61	Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan			250	300	360	360	48	300	360	360
62	Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan			250	300	360	360	48	300	360	360
63	Jumlah layanan korban kekerasan yang diberikan			40	40	48	58	127	40	48	58
64	Jumlah layanan korban kekerasan			40	40	48	58	127	40	48	58
65	Jumlah anggota gugus tugas yang mendapatkan penguatan, anggota lintas sektoral yang bersinergi			96	96	115	138	92	96	115	138
66	Jumlah anggota gugus tugas yang mendapatkan penguatan, anggota lintas sektoral yang bersinergi			96	96	110	110	92	96	110	110
67	tersediannya informasi data keluarga			100	100	100	100	100	100	100	100
68	Jumlah pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga			12	12	12	12	12	12	12	12
69	Pelaksanaan Pengumpulan data primer tentang data kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga dan data anggota keluarga			100	12	12	12	100	12	12	12
70	Peningkatan jumlah akseptor MKJP	24,2	24,2	25,2	25,3	25,4	25,97	25,2	25,3	25,4	
71	Peningkatan CU/PUS	72,8	72,8	75	75,2	75,4	72,77	75	75,2	75,4	
72	Jumlah pendidik/Motivator sebaya			340	340	340	340	0	340	340	340
73	Jumlah kampung KB dasar yang mengalami kenaikan status			10	10	10	10	0	10	10	10

74	Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan		18,20	19,2	20	20,1	20,2	0	20	20,1	20,2	
75	Jumlah Kecamatan yang teradvokasi KIE			40	40	40	40	40	40	40	40	
76	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Kelompok Keluarga Paripurna Setiap Kecamatan			40	40	40	40	40	40	40	40	
77	Tertindakannya Manajemen dan Media KIE Bantuan Operasional Keluarga Berencana			100	6	6	6	100	6	6	6	
78	Tersedianya anggaran operasional keluarga berencana untuk kecamatan di kabupaten Cirebon			1	40	40	40	1	40	40	40	
79	Jumlah kader PPKDB dan Sub PPKDB yang mendapat pembinaan			1	3177	3250	3300	1	3177	3250	3300	
80	Tersedianya anggaran untuk kader PPKDB dan Sub PPKDB se Kabupaten Cirebon			1	3177	3250	3300	1	3177	3250	3300	
81	Jumlah peserta KB Baru			86802	86900	8700	87100	0	86900	8700	87100	
82	Tertindakannya pendistribusian alokon			1	5	5	5	1	5	5	5	
83	Jumlah Peserta KB yang dilayani			7300	7300	7300	7300	7290	7300	7300	7300	
84	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor dan Perlatan Gedung Kantor			4	4	5	5	4	4	5	5	
85	Jumlah Remaja yang mengikuti Sosialisasi / Orientasi Peningkatan Perlindungan dan Hak-Hak Reproduksi			400	400	400	400	400	400	400	400	
86	Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi KHIBA			855	855	855	855	23	855	855	855	
87	Jumlah Kampung KB yang diberikan pembinaan			10	10	10	10	0	10	10	10	
88	Jumlah Kampung KB yang dibina			10	10	10	10	0	10	10	10	
89	Cakupan anggota Bina Keluarga (BKB/BKR/BKL) ber-KB			56,98	57,24	57,52	57,88	55,47	57,24	57,52	57,88	

90	Jumlah Anggota BKB, BKR dan BKL			72722	72722	72822	72872	0	72722	72822	72872	
91	Tersedianya Sarana dan Prasarana Stunting			2	2	2	2	2	2	2	2	
92	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Pendampingan untuk kegiatan bina bina			10	10	10	10	0	10	10	10	

Dari hasil capaian tersebut diatas dapat dilihat bahwa hanya ada 3 indikator kinerja yang termasuk kedalam Indikator Kinerja Kunci diantaranya adalah :

- a. Peningkatan jumlah akseptor MKJP
- b. Peningkatan CU/PUS
- c. Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan

Hasil capaian kinerja tersebut diatas terdapat beberapa indikator yang capaiannya kurang maksimal karena permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan pada sub bab II.1, besar harapan untuk kinerja pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik lagi dengan meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

### **II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa isu-isu penting dalam pelaksanaan program/kegiatan. Memiliki misi “menurunkan kesenjangan sosial kependudukan” Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi isu-isu sosial kependudukan yang ada, diantaranya adalah :

- a. Rendahnya keikutsertaan ber-KB;
- b. Tingkat kesejahteraan keluarga;
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- d. Ketahanan Keluarga;
- e. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- f. Laju pertumbuhan penduduk;
- g. Angka Kelahiran;
- h. Partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- i. Peningkatan status Kampung KB.

Dengan melihat beberapa isu tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa isu-isu yang muncul pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan isu-isu yang harus dituntaskan secara bersama-sama baik dengan lintas sektoral maupun dengan masyarakat secara langsung.

#### **II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan Rencana Kerja 2024 tidak lepas dari proses perencanaan RKPD yang dituangkan di dalam Rencana Strategis 2019-2024. Pada langkah awal penyusunan Rencana Kerja 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan telaah terhadap RKPD yang sudah di susun dengan kebutuhan program/kegiatan dengan menyesuaikan pagu anggaran yang sudah disediakan. Terdapat beberapa kegiatan yang memang urgensinya sangat tinggi dan rendah, hal tersebut dilakukan berdasarkan prioritas kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2024.

Pada proses penyesuaian ini ditemukan beberapa catatan penting dalam rencana anggaran 2024, dengan masih tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak, rendahnya keikutsetaan KB pria, rentang usia perkawainan pertama yang masih rendah, peningkatan Kabupaten Layak Anak, menekan angka perceraian dengan memperkuat ketahanan keluarga, masih tingginya angka kelahiran pada setiap keluarga dan rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil dari telaah diatas, maka pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan hasil catatan tersebut, adapun review perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan Rencana Kerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

## II.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 15 Pebruari 2023, dengan mengundang PD pada lingkup sosial. Adapun hasil yang diperoleh dari Forum Perangkat Daerah tersebut adalah bagaimana peran penting koordinasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga apa yang sudah direncanakan dapat dicapai dengan baik.

Pada pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lepas dari peran serta masyarakat. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volume	Cata tan
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Sumber	Rp 23.258.700,00	PIK
			Kec. Weru	Rp 1.800.000,00	
			Kec. Plered	Rp 1.800.000,00	
			Kec. Palimanan	Rp 23.258.700,00	
			Kec. Klangeran	Rp 1.800.000,00	
			Kec. Arjawinangun	Rp 19.800.000,00	
			Kec. Gegesik	Rp 23.258.700,00	
			Kec. Kaliwedi	Rp 16.200.000,00	
			Kec. Kedawung	Rp 1.800.000,00	
			Kec. Kapetakan	Rp 1.800.000,00	
			Kec. Tengah Tani	Rp 1.800.000,00	
			Kec. Suranenggala	Rp 1.800.000,00	
			Kec. Pabedilan	Rp 21.800.000,00	
			Kec. Sedong	Rp 1.800.000,00	
			Kec. Gebang	Rp 1.800.000,00	
			Kec. Lemahabang	Rp 22.400.000,00	
			Kec. Pasaleman	Rp 9.000.000,00	
			Kec. Karangwareng	Rp 8.091.000,00	
			Kec. Astanajapura	Rp 20.000.000,00	
Kec. Mundu	Rp 1.800.000,00				
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 205.067.100,00</b>	
2	Pengembangan Komunikasi,	Jumlah Dokumen	Kec. Sumber	Rp 56.484.800,00	PIK
			Kec. Dukupuntang	Rp 20.052.000,00	

Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kec. Plumbon	Rp 20.000.000,00
		Kec. Weru	Rp 40.384.800,00
		Kec. Plered	Rp 20.380.000,00
		Kec. Palimanan	Rp 40.384.800,00
		Kec. Klangeran	Rp 40.200.000,00
		Kec. Depok	Rp 20.100.000,00
		Kec. Gempol	Rp 20.000.000,00
		Kec. Jamblang	Rp 20.052.000,00
		Kec. Talun	Rp 20.000.000,00
		Kec. Tengah Tani	Rp 20.000.000,00
		Kec. Losari	Rp 10.000.000,00
		Kec. Sedong	Rp 20.332.000,00
		Kec. Gebang	Rp 20.000.000,00
		Kec. Waled	Rp 20.000.000,00
		Kec. Susukan Lebak	Rp 20.332.800,00
		Kec. Beber	Rp 20.332.800,00
Kec. Greged	Rp 20.000.000,00		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 469.036.000,00</b>	

Usulan tersebut merupakan hasil dari ajuan langsung dari 31 Kecamatan dengan menyasar langsung pada Prioritas Daerah No. 5. Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Prioritas Usulan No. 3. Pemberdayaan Perempuan dan Kota Layak Anak.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### III.1 Telaah Kebijakan Nasional

Berdasarkan namanya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon memiliki 2 (dua) urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Masing-masing urusan didasari oleh rencana atau kebijakan pada kementerian masing masing.

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO;
- c. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya;

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

- a) meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
  - 1) Penguatan pemahaman 8 (delapan) fungsi keluarga.



- 2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
  - 3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
  - 4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
  - 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
  - 6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
  - 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b) menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
- 1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
  - 2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
  - 3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
  - 4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
- c) meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
- 1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
  - 2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR. Rencana Strategis BKKBN 2020-2024
  - 3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
  - 4) Peningkatan KB Pria.
  - 5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak

diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).

- 6) Peningkatan kemandirian PUS dalam KB.
- d) meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
  - 1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
  - 2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- e) memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
  - 1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
  - 2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Dengan melihat kebijakan nasional diatas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Peningkatan Kapasitas perempuan dalam kehidupan politik sosial dan budaya
  1. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang pembangunan, ekonomi dan politik
- b) Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat
  1. Peningkatan Pendapatan Perempuan
- c) Peningkatan program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah
  1. Meningkatkan program pemberdayaan keluarga melalui pengembangan usaha di rumah untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah
- d) Peningkatan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif

1. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif
- e) Meningkatkan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak
  1. Meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak untuk keluarga yang berkualitas
  2. Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
  3. Efektivitas kelembagaan perlindungan anak
- f) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
  1. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- g) Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender
  1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di Dinas DPPKBP3A
- h) Memperbanyak kampung KB
  1. Meningkatkan 8 (delapan ) fungsi keluarga
- i) Melaksanakan Pendataan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan Kependudukan
  1. Mensinergikan program lintas sektoral
- j) Meningkatkan kegiatan TRIBINA dan UPPKS
  1. Menghasilkan update data keluarga
- k) Mensosialisasikan sekolah berwawasan Kependudukan
  1. Menciptakan penduduk tumbuh seimbang
- l) Mengadakan kajian Kependudukan
  1. Tersusunnya buku kajian kependudukan
- m) Memantapkan peserta KB aktif diatas 60%
  1. Meningkatkan kegiatan KIE
  2. Meningkatkan peserta KB MKJP
  3. Meningkatkan peserta KB Pria
  4. Menekan Peserta KB Istirahat
- n) Meningkatkan Rata-rata Usia Perkawinan pertama diatas 20 tahun
  1. Meningkatkan Program PUP
  2. Menurunkan PUS <20 tahun
  3. Meningkatkan Program KB-KRkegia

### III.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah menetapkan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tujuan :**

1. Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kualitas keluarga
2. Terlindunginya kelompok rentan
3. Mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk
4. Meningkatnya pelayanan

### III.3 Program Dan Kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam perumusan program dan kegiatan mengacu pada visi dan misi kepala daerah tahun periode 2019-2024 yaitu Visi “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman” dan “Misi Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon merumuskan tujuan dan sasaran dalam rangka upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

**Tujuan :**

1. Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kualitas keluarga
2. Terlindunginya kelompok rentan
3. Mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk
4. Meningkatnya pelayanan

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 pada tabel 3.1 terlampir.

## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## IV.1 Target Kinerja

## a. Tujuan &amp; Sasaran

Dalam rangka menyukseskan visi dan misi kepala daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumus	Satuan	Target
Mengendalikan kesenjangan sosial kependudukan		Ketahanan keluarga yang ditandai dengan Cakupan keluarga Pra KS dan KS1	Jumlah keluarga Pra-KS dan KS-1 / Jumlah KK	Persen	47,32
	Meningkatnya keluarga sejahtera	meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	KS-1 + KS-2 / Jumlah KK	Persen	87,54
		Cakupan keluarga Pra KS	Pra-KS / Jumlah KK	Persen	7,28
	Terlindunginya kelompok Rentan	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan (Penguatan) / jumlah perempuan dan anak *100	Persen	0,335
	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Angka TFR		Point	2,20
	Meningkatnya pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat		Point	90

## b. Program dan Kegiatan

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya, maka sebagai pendukung disusun pula program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Kerja 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
<b>0</b>	<b>NON URUSAN</b>			<b>20.575.125.100,00</b>
<b>0.00.</b>	<b>NON BIDANG URUSAN</b>			<b>20.575.125.100,00</b>
<b>0.00.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan	100 Persen	<b>18.188.905.100,00</b>
<b>0.00.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja skpd yang tersusun	7 Dokumen	<b>99.113.000,00</b>
0.00.01.2.01.001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	33.538.500,00
0.00.01.2.01.006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.924.100,00
0.00.01.2.01.007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Laporan	49.650.400,00
<b>0.00.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	3 Dokumen	<b>18.808.611.200,00</b>
0.00.01.2.02.001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	18.789.000.000,00
0.00.01.2.02.005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.010.700,00
0.00.01.2.02.007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	9.600.500,00
<b>0.00.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah	1 Dokumen	<b>34.000.000,00</b>
0.00.01.2.03.002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	34.000.000,00
<b>0.00.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen terselenggaranya layanan pelaksanaan administrasi umum kantor	7 dokumen	<b>500.457.800,00</b>
0.00.01.2.06.001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	9.071.000,00
0.00.01.2.06.002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	61.820.000,00
0.00.01.2.06.005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	27.544.000,00
0.00.01.2.06.006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	16.000 Dokumen	79.000.000,00
0.00.01.2.06.007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	137.245.600,00
0.00.01.2.06.008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	15.900.000,00
0.00.01.2.06.009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	60.120.300,00
0.00.01.2.06.010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	109.756.900,00
<b>0.00.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	<b>13.879.000,00</b>

0.00.01.2.07.005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	13.879.000,00
<b>0.00.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jasa penunjang urusan administrasi umum yang dilaksanakan	4 jenis	<b>311.142.400,00</b>
0.00.01.2.08.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	124.783.500,00
0.00.01.2.08.004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	186.358.900,00
<b>0.00.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang diberikan pemeliharaan	268 unit	<b>807.921.700,00</b>
0.00.01.2.09.001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	522.044.200,00
0.00.01.2.09.002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	161 Unit	34.977.500,00
0.00.01.2.09.009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	250.900.000,00
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>54.400.081.272,00</b>
<b>2.08.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>14.429.346.384,00</b>
<b>2.08.02.</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan	25 Persen	<b>195.995.700,00</b>
		Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	12,3 Persen	609.105.900,00
		Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	36,2 Persen	535.970.800,00
<b>2.08.02.2.01.</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender	133 Orang	<b>185.995.700,00</b>
2.08.02.2.01.004.	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	133 Perangkat Daerah	185.995.700,00
<b>2.08.02.2.02.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina	175 orang	<b>535.970.800,00</b>
2.08.02.2.02.001.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Dokumen	385.970.800,00
2.08.02.2.02.002.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Organisasi	150.000.000,00
<b>2.08.02.2.03.</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah perempuan kategori umum serta perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan	160 Orang	<b>619.105.900,00</b>

2.08.02.2.03.002.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10.000.000,00
2.08.02.2.03.003.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	300 Dokumen	609.105.900,00
<b>2.08.03.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase perempuan yang mendapat perlindungan	1,41 Persen	<b>362.499.900,00</b>
<b>2.08.03.2.01.</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	245 orang	<b>237.757.800,00</b>
		jumlah tayang iklan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	6 Tayangan	-
		Jumlah tayangan program tv masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	6 Tayangan	-
2.08.03.2.01.001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	245 Dokumen	137.757.800,00
2.08.03.2.01.002.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	245 Perangkat Daerah	100.000.000,00
<b>2.08.03.2.02.</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Korban yang mendapatkan Pelayanan terpadu	90 Persen	<b>124.742.100,00</b>
2.08.03.2.02.001.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 Orang	124.742.100,00
<b>2.08.04.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian	0,81 Persen	<b>6.924.856.340,00</b>
<b>2.08.04.2.01.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah perempuan yang diberikan pembinaan pemberdayaan perempuan	100 orang	<b>6.778.631.740,00</b>
2.08.04.2.01.001.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	150.128.640,00
2.08.04.2.01.003.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Dokumen	6.628.503.100,00
<b>2.08.04.2.03.</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah peserta yang diberikan pelayanan komprehensif	138 orang	<b>146.224.600,00</b>
2.08.04.2.03.001.	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	138 Layanan	146.224.600,00
<b>2.08.05.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender	100 Persen	<b>166.998.000,00</b>
<b>2.08.05.2.01.</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>	tersedianya buku data terpilah gender dan anak	120 Buku	166.998.000,00



2.08.05.2.01.001.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	120 Dokumen	166.998.000,00
2.08.06.	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Presentase anak yang mendapat perlindungan	2,4 Persen	5.700.396.700,00
2.08.06.2.02.	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah orang yang mendapatkan layanan penguatan kualitas keluarga	1.425 Orang	5.700.396.700,00
2.08.06.2.02.001.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5.264.743.700,00
2.08.06.2.02.002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	635 Dokumen	431.620.000,00
2.08.06.2.02.003.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Dokumen	4.033.000,00
2.08.07.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Jumlah layanan korban kekerasan	100 Persen	<b>1.078.599.744,00</b>
2.08.07.2.01.	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan	360 orang	<b>93.398.400,00</b>
2.08.07.2.01.003.	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	360 Kegiatan	93.398.400,00
2.08.07.2.02.	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah layanan korban kekerasan yang diberikan	58 layanan	<b>709.785.600,00</b>
2.08.07.2.02.006.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	58 Orang	709.785.600,00
2.08.07.2.03.	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah anggota gugus tugas yang mendapatkan penguatan, anggota lintas sektoral yang bersinergi	138 orang	<b>275.415.744,00</b>
2.08.07.2.03.005.	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	132 Kegiatan	138.000.000,00
2.08.07.2.03.006.	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	132 Orang	137.415.744,00
2.14.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>39.970.734.888,00</b>
2.14.02.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	tersediannya informasi data keluarga	100 persen	<b>1.332.076.631,00</b>
2.14.02.2.01.	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Jumlah dokumen GDPK yang tersusun	1 Dokumen	<b>342.780.480,00</b>
2.14.02.2.01.002.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	225.000.000,00

2.14.02.2.01.023.	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	350 Kegiatan	117.780.480,00
<b>2.14.02.2.02.</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	12 bulan	<b>989.296.151,00</b>
2.14.02.2.02.009.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	40 Laporan	151.910.358,00
2.14.02.2.02.011.	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	11.778 Dokumen	58.301.793,00
2.14.02.2.02.012.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	707.210.000,00
2.14.02.2.02.013.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	32 Dokumen	71.874.000,00
<b>2.14.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Peningkatan jumlah akseptor MKJP	25,4 Persen	981.395.440,00
		Peningkatan CU/PUS	75,4 Persen	16.624.259.118,00
		Jumlah pendidik/Motivator sebaya	340 Orang	58.723.960,00
		Jumlah kampung KB dasar yang mengalami kenaikan status	10 Kampung KB	4.499.112.860,00
		Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan	20,2 Tahun	727.487.579,00
<b>2.14.03.2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Jumlah Kecamatan yang teradvokasi KIE	40 Kecamatan	<b>14.638.228.240,00</b>
2.14.03.2.01.008.	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	69 Laporan	47.589.300,00
2.14.03.2.01.009.	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Unit	1.400.000.000,00
2.14.03.2.01.010.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	40 Laporan	12.637.064.956,00
2.14.03.2.01.011.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	210 Laporan	29.970.500,00
2.14.03.2.01.012.	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	73 Dokumen	282.783.360,00
2.14.03.2.01.013.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	69 Dokumen	29.952.824,00
2.14.03.2.01.014.	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40 Organisasi	210.867.300,00

2.14.03.2.02.	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Jumlah kader PPKDB dan Sub PPKDB yang mendapat pembinaan	3.300 Orang	<b>3.396.550.000,00</b>
2.14.03.2.02.004.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3.300 Orang	2.500.000.000,00
2.14.03.2.02.005.	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	424 Organisasi	830.000.000,00
2.14.03.2.02.006.	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	45 Laporan	66.550.000,00
2.14.03.2.03.	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah peserta KB Baru	87.100 orang	<b>4.774.231.157,00</b>
2.14.03.2.03.001.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 Laporan	5.000.000,00
2.14.03.2.03.003.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7.300 Orang	84.845.440,00
2.14.03.2.03.006.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	4.206.276.000,00
2.14.03.2.03.008.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	400 Laporan	169.229.995,00
2.14.03.2.03.010.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	400 Orang	167.961.600,00
2.14.03.2.03.013.	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	100 Orang	58.723.960,00
2.14.03.2.03.016.	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	855 Orang	82.194.162,00
2.14.03.2.04.	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	Jumlah Kampung KB yang diberikan pembinaan	10 Kampung KB	<b>81.969.560,00</b>
2.14.03.2.04.006.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Kampung	81.969.560,00
2.14.04.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Presentase anggota bina keluarga yang ber-KB	57,88 Persen	<b>15.747.679.300,00</b>
2.14.04.2.01.	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Jumlah Anggota BKB, BKR dan BKL	72.872 Anggota	<b>15.747.679.300,00</b>

2.14.04.2.01.0018.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	2 Unit	2.750.000.000,00
2.14.04.2.01.0021.	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	32 Laporan	47.010.700,00
2.14.04.2.01.0024.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	45.496 Orang	12.573.715.000,00
2.14.04.2.01.0026.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	10 Kelompok	74.208.000,00
2.14.04.2.01.0028.	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	424 Kelompok	302.745.600,00
<b>J U M L A H</b>				<b>74.975.206.372,00</b>

**c. Program dan Kegiatan Prioritas**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tentu terdapat skala prioritas didalamnya. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri telah menentukan program prioritas yang bertujuan untuk mendukung capaian visi dan misi kepala daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan	25 Persen
		Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	12,3 Persen
		Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	36,2 Persen
2.08.02.2.01.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender	133 Orang

2.08.02.2.01.04.	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender, (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	133 Perangkat Daerah
2.08.02.2.03.	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah perempuan kategori umum serta perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan	160 Orang
2.08.02.2.03.03.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	300 Dokumen
2.08.03.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase perempuan yang mendapat perlindungan	1,41 Persen
2.08.03.2.02.	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Korban yang mendapatkan Pelayanan terpadu	90 Persen
2.08.03.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat, Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 Orang
2.08.04.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian	0,81 Persen
2.08.04.2.03.	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah peserta yang diberikan pelayanan komprehensif	138 orang
2.08.04.2.03.01.	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	138 Layanan
2.08.06.	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Presentase anak yang mendapat perlindungan	2,4 Persen
2.08.06.2.02.	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah orang yang mendapatkan layanan penguatan kualitas keluarga	1.425 Orang
2.08.06.2.02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan, Kabupaten/Kota	50 Orang
2.08.07.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Jumlah layanan korban kekerasan	100 Persen
2.08.07.2.01.	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan	360 orang
2.08.07.2.01.0003.	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	360 Kegiatan
2.08.07.2.02.	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah layanan korban kekerasan yang diberikan	58 layanan
2.08.07.2.02.0006.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	58 Orang
2.08.07.2.03.	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah anggota gugus tugas yang mendapatkan penguatan, anggota lintas sektoral yang bersinergi	138 orang
2.08.07.2.03.0005.	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	132 Kegiatan

2.08.07.2.03.0006.	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	132 Orang
2.14.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
2.14.02.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	tersediannya informasi data keluarga	100 Persen
2.14.02.2.01.	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Jumlah dokumen GDPK yang tersusun	1 Dokumen
2.14.02.2.01.02.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2.14.02.2.02.	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	12 bulan
2.14.02.2.02.12.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan
2.14.03.	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Peningkatan jumlah akseptor MKJP	25,4 Persen
		Peningkatan CU/PUS	75,4 Persen
		Jumlah pendidik/Motivator sebaya	340 Orang
		Jumlah kampung KB dasar yang mengalami kenaikan status	10 Kampung KB
		Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan	20,2 Tahun
2.14.03.2.01.	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Jumlah Kecamatan yang teradvokasi KIE	40 Kecamatan
2.14.03.2.01.001 I	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	210 Laporan
2.14.03.2.03.	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah peserta KB Baru	87.100 orang
2.14.03.2.03.03.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan, Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7.300 Orang
2.14.03.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 unit
2.14.03.2.03.001 6.	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	855 orang
2.14.03.2.03.13.	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan, Kesetaraan KB Pria	100 Orang
2.14.03.2.04.	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	Jumlah Kampung KB yang diberikan pembinaan	10 Kampung KB

2.14.03.2.04.000 6.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Kampung
2.14.04.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Presentase anggota bina keluarga yang ber-KB	57,88 Persen
2.14.04.2.01.	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Jumlah Anggota BKB, BKR dan BKL	72.872 Anggota
2.14.04.2.01.002 8.	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	424 Kelompok
2.14.04.2.01.002 1.	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	32 Laporan
2.14.04.2.01.002 6.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	10 Kelompok

## BAB V

### P E N U T U P

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah sepakat untuk melaksanakan Rencana Kinerja yang telah disusun ini demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Sebagai suatu instansi pemerintah di Kabupaten Cirebon yang memegang peranan penting dalam meningkatkan peranan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan dirumuskannya Rencana Kinerja Tahun 2024. Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon bersiap diri menyongsong kondisi dimasa depan melalui rancangan arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Rencana Kinerja inilah yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis.

Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dikomunikasikan kepada seluruh jajaran unit kerja. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki komitmen bersama untuk maju dari seluruh jajaran unit kerja untuk mendukung keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Catatan penting yang perlu menjadi perhatian bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini akan sukses dilaksanakan apabila terdapat dukungan baik internal maupun eksternal yaitu SKPD terkait dengan bidang sosial, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan ini mendapat hasil yang maksimal. Selain hal tersebut, pentingnya komunikasi dan koordinasi



menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Hal-hal mengenai kaidah pelaksanaan akan dicantumkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada masing-masing Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024, sehingga apa yang akan dilaksanakan oleh bidang terkait dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama dan mencapai target kinerja yang sudah ditentukan.



Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMI RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR